

Pemetaan Isu Strategis Urusan Perangkat Daerah Di Kabupaten Bekasi

Merdi Hajiji ^{1,*}, Bambang Rudiansah ¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Langlangbuana; e-mail:
hajijiimerdi@gmail.com, bambang.rudiansah@unla.ac.id

* Korespondensi: e-mail: hajijiimerdi@gmail.com

Submitted: 11/02/2025; Revised: 15/04/2025; Accepted: 17/04/2025; Published: 27/05/2025

Abstract

This research aims to map strategic issues in Bekasi Regency to increase the acceptability of regional development priorities. The regional development problems faced are the gap between the achieved and planned development performance, as well as the difference between the goals and the real conditions. This research uses a qualitative descriptive research design with interview, observation, and documentation study methods. The results show that strategic issue analysis is crucial in the regional development planning process. Identifying the right issues can increase the acceptability of development priorities and help regional authorities make informed decisions. Strategic issues are obtained from internal and external analysis, namely identifying problems and conditions that create opportunities and threats for regional authorities. Thus, this research can help improve the effectiveness of regional development in Bekasi Regency.

Keywords: Strategic Issues, Regional Official Affairs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dan yang direncanakan, serta perbedaan antara tujuan dan kondisi real. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis isu-isu strategis sangat penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dan membantu perangkat daerah dalam membuat keputusan yang tepat. Isu strategis diperoleh dari analisis internal dan eksternal, yaitu identifikasi permasalahan dan kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

Kata kunci: Isu Strategis, Urusan Perangkat Daerah

1. Pendahuluan

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 5%. Namun, pada saat yang bersamaan terdapat persoalan kerusakan lingkungan, yang akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Permasalahan lingkungan tersebut diantaranya kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, penggundulan hutan di Aceh, degradasi kualitas daerah aliran sungai Citarum, dan banjir di sebagian besar wilayah DKI Jakarta hanyalah sebagian kecil contoh bagaimana aktivitas yang

mengatasnamakan kebutuhan ekonomi mengalahkan kelestarian alam. Kecepatan pembangunan di Indonesia tidak diimbangi dengan perhatian pembuat kebijakan dalam memperhatikan lingkungan (Alfian, 2018). Kondisi tersebut ditambah buruk dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten. Kurangnya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan telah mengakibatkan meningkatnya bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan dengan kerugian yang terus meningkat baik berupa korban jiwa maupun material. Singkatnya, pola pembangunan di Indonesia masih jauh dari apa yang digaungkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Muzaqi et al., 2020).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan parallel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi (Mindarti & Muzaqi, 2018) (Ajie Hanif Muzaqi & Tri Ambulanto, 2020).

Salah satu yang berpegang teguh dengan KLHS adalah pengembangan wilayah Kabupaten Bekasi sejalan dengan dilaksanakannya pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi dengan sistem nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 Ayat (1). Rencana ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu RPJPD untuk jangka panjang 20 tahun, RPJMD untuk jangka menengah 5 tahun, dan RKPD untuk rencana tahunan. Ketiga rencana ini disusun dan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12), Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bekerja keras untuk menciptakan KLHS yang sesuai dan menguntungkan banyak belah pihak, mengingat bahwa Kabupaten Bekasi adalah salah satu Kabupaten dengan sektor industrial terbesar di Indonesia. Sehingga diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan Kabupaten Bekasi yang makmur dan jaya.

Dalam RPJPD Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat di dalamnya, hal ini memberikan pandangan bahwa pemerintah memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya dalam melaksanakan RPJPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Bekasi periode 2005-2025 akan segera berakhir masa berlakunya, sehingga perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang yang baru. Sebagai upaya untuk menyusun RPJMD tentunya pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempersiapkan berbagai kebutuhan perencanaan tersebut, yang diantaranya mulai menyusun peta permasalahan dan isu strategis. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Bekasi telah juga mempersiapkan penyusunan permasalahan dan isu strategis sesuai dengan jumlah mitra kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Setelah selesai penyusunan permasalahan dilanjutkan dengan penyusunan isu strategis yang terbagi ke bidang urusan yang diantaranya: a) Isu strategis Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; b) Isu strategis urusan pemerintahan umum; c) Isu strategis urusan ketentraman dan ketertiban; d) Isu strategis Kependudukan Dan Catatan Sipil; e) Isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f) Isu strategis urusan Komunikasi Dan Informatika; g) Isu strategis urusan statistika (Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (Rpjpd) Bekasi Tahun 2025-2045. Bappeda Kabupaten Bekasi, 2024)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitiannya. Penelitian deskriptif adalah suatu penulisan yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti berdasarkan keadaan sebenarnya pada saat penelitian langsung, sehingga data yang diperoleh merupakan refleksi dari keadaan yang sebenarnya di lapangan. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah, artinya situasi lapangan penelitian dibiarkan sebagaimana adanya tanpa manipulasi, pengaturan, atau intervensi dari peneliti. Penelitian ini tidak menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya ingin mengetahui keadaan variabel secara lepas tanpa menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya secara sistematis, sehingga metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang objek yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Prioritisasi isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan (Eka Fajar Rahmani et al., 2024). Prioritisasi isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot. Setiap isu strategis diberi nilai berdasarkan setiap kriteria dan akhirnya diperoleh nilai total masing-masing isu strategis. Kriteria yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Dan Bobot Kriteria Dalam Prioritisasi Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat besar	25
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Mendesak untuk ditangani	15
Jumlah Total		100

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Pembobotan dilakukan setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perumusan Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian Provinsi dan target Indikator Umum pada RPJMD periode 2025-2029. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi. Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Dalam pembangunan daerah, terdapat beberapa tingkat masalah yang perlu dipecahkan, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah isu besar yang bersifat makro dan memerlukan solusi melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok yang dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara itu, akar masalah adalah penyebab yang lebih spesifik dari masalah yang dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Dengan memahami dan menyelesaikan masalah-masalah ini secara bertahap, pembangunan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, penting untuk memahami dan merujuk pada permasalahan pembangunan yang kompleks. Dengan kebijakan yang tepat dan

terarah, dapat dihasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan yang tepat juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada (Hamdi, 2014).

3.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang digerakkan PBB untuk diikuti seluruh negara di dunia. TPB 2016-2030 mencakup 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Sekretaris Jenderal PBB telah mengajukan enam kerangka elemen SDGs, kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia (Alom, 2018).

Di Indonesia, TPB mempengaruhi pembangunan daerah melalui pengintegrasian ke dalam RPJMD yang diatur dalam Permendagri 86/2017 serta melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Toraja Utara memiliki relevansi tinggi dengan TPB khususnya terkait dengan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, relasi gender dan sebagainya (Morita et al., 2020).

3.5. Isu Strategis Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya (Barmeyer et al., 2019). Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis urusan perangkat daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah di masa lima tahun mendatang.

Berikut hasil penyusunan isu strategis berdasarkan setiap urusan di Kabupaten Bekasi (Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kabupaten Bekasi Tahun 2025 – 2045):

Tabel 2. Isu Strategis Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan	Isu Strategis
1	Pendidikan	1. Kualitas Sumber Daya Pendidikan 2. Tingkat Kesejahteraan Guru 3. Kompetensi Guru 4. Pertumbuhan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak diimbangi dengan pertumbuhan Sekolah Dasar (SD)
2	Kesehatan	1. Kualitas pelayanan kesehatan dasar 2. Kualitas Sumber Daya Kesehatan 3. Standar mutu dan layanan kesehatan 4. Peningkatan control terhadap peredaran obat dan makanan

No	Urusan	Isu Strategis
3	Sosial	5. Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menura.
		1. Kualitas Sumber Daya Sosial
		2. Integrasi data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Kemiskinan
		3. peningkatan kontribusi dari sektor industri untuk mengentaskan kemiskinan melalui dana corporate sosial responsibility (CSR).
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
		2. Kualitas pembinaan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam politik
		3. peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Sumber: Hasil Penelitian (Tahun)

Tabel 3 menyajikan isu strategis urusan wajib non pelayanan dasar yang mencakup sebelas urusan umum.

Tabel 3. Isu Strategis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan	Isu Strategis
1	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Kualitas Sumber Daya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		2. Integrasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan antar perangkat daerah
		3. Integrasi Kebijakan perlindungan Perempuan antar perangkat daerah.
2	Kependudukan Dan Catatan Sipil	1. Kualitas Pemenuhan kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan
		2. Kualitas Pemenuhan kebutuhan akan layanan pencatatan sipil.
3	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Kualitas Sumber Daya Pemerintahan Desa
		2. Kualitas Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa
		3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
4	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	1. Laju Pertumbuhan Urbanisasi di Kabupaten Bekasi tinggi
		2. partisipasi masyarakat dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang

No	Urusan	Isu Strategis
		3. Kualitas layanan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja/mahasiswa.
5	Pemuda Olahraga	1. Kualitas kesadaran dari organisasi pemuda akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa 2. Kualitas sumber daya Pemuda dan Olahraga 3. Kualitas motivasi atlet dan pelatih di setiap cabang olahraga.
6	Kebudayaan	1. Kualitas apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, terutama setelah masuknya budaya asing akibat globalisasi 2. Pelestarian terhadap situs/cagar dan karya budaya serta peningkatan terhadap kualitas sarana dan prasarana budaya
7	Perpustakaan	1. Standarisasi pelayanan informasi perpustakaan 2. Kualitas Sumber Daya perpustakaan 3. Pemanfaatan system teknologi dan informasi Perpustakaan.
8	Kearsipan	1. Standarisasi pelayanan penyelenggaraan kearsipan 2. Kualitas Sumber Daya Kearsipan 3. Pemanfaatan system teknologi dan informasi kearsipan.
9	Informatika	1. Kualitas pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik secara terintegrasi 2. Kualitas sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bisa dimanfaatkan oleh kaum difabel.
10	Statistika	1. Kualitas satu data pembangunan di Kabupaten Bekasi 2. Kualitas Sumber daya dalam penataan data statistika.
11	Persandian	Kualitas pengamanan informasi dan pengelolaan urusan persandian di Kabupaten Bekasi.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Tabel 4 menyajikan isu strategis urusan pemerintahan umum, untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dengan mengidentifikasi isu-isunya.

Tabel 4. Isu Strategis Urusan Pemerintahan Umum

No	Urusan	Isu Strategis
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kualitas pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga sering terjadinya pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat. 2. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial, politik dan ekonomi, rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di masyarakat. 3. Kualitas pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Tabel 5 menyajikan isu strategis tata kelola dan pelayanan publik untuk urusan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 5. Isu Strategis Tata Kelola Dan Pelayanan Publik

No	Urusan	Isu Strategis
1	Tata Kelola Pemerintahan (<i>Synamic Governance</i>)	1. Kualitas Reformasi Birokrasi berdampak, dimana sudah diterbitkan kebijakan RB tematik dan berdampak. 2. Kualitas kolaborasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan SAKIP yang lebih baik. 3. Ketergantungan dana transfer tinggi menjadi isu bagi pemerintah daerah agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2	Pelayanan Publik	1. Kualitas Indeks Pelayanan Publik (IPP). 2. Kualitas Manajemen Risiko. 3. Kulaitas Partisipasi masyarakat dalam penyunan kebijakan pelayanan publik.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Mengacu pada Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2045, maka Arah Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045 adalah pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju, peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penerapan ekonomi hijau, biru dan digital, pembangunan SDM berdaya saing, integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global, pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan, peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif, peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas, terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah, peningkatan kerjasama regional maupun internasional, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender, peningkatan kualitas lingkungan hidup,

peningkatan ketahanan pangan, air dan energi, serta peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim (Ribeiro et al., 2021).

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Bekasi Yang Maju, Harmonis Dan Berkelanjutan Tahun 2045” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana (Torfing, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebagai bagian dari kajian mengenai Pemetaan Isu Strategis Urusan Perangkat Daerah Di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan dalam RPJPD memiliki hambatan dalam masalah implementasi kebijakan, dimana pembangunan yang dicapai dan apa yang direncanakan berbeda jauh, sehingga harus dilakukan pemecahan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah. Dalam hal ini Pembangunan Berkelanjutan menjadi acuan utama untuk pembangunan yang akan datang di Kabupaten Bekasi, dengan memfokuskan kebijakan kepada isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. Sehingga arah RPJPD Kabupaten Bekasi pada Tahun 2025-2045 berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi, lingkungan serta pemerintah yang akan terus berintegritasi. Keberhasilan pembangunan RPJPD Kabupaten Bekasi tidak lupa dari komitmen kepemimpinan, konsekuensi kebijakan dan pemerintah yang berintegritas serta kerja sama dari pihak masyarakat itu sendiri, sehingga RPJPD pada Tahun 2025 – 2045 dapat terealisasi.

Daftar Pustaka

- Ajie Hanif Muzaqi, & Tri Ambulanto. (2020). Pemetaan Isu Strategis Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*.
- Alfian, F. D. (2018). *The Policy Model Strategy For The Development Of SME Batik Blimbing Malang Using A Balanced Scorecard Method: Vol. 10(16)*. Eurasia: Economics & Business.
- Alom, M. M. (2018). *Proactive Transparency And Outward Accountability Of Frontline Public Bureaucracies: An Integrated Model*. International Journal Of Productivity And Performance Management.
- Barmeyer, C., Mayrhofer, U., & Würfl, K. (2019). *Informal Information Flows In Organizations: The Role Of The Italian Coffee Break: Vol. 28(4)*. International Business Review.
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kabupaten Bekasi Tahun 2025 – 2045.

- Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (Rpjpd) Bekasi Tahun 2025-2045. Bappeda Kabupaten Bekasi (2024).
- Eka Fajar Rahmani, Luwandi Suhartono, & dkk. (2024). Penelitian Statistik Kualitatif Untuk Penelitian Bahasa. *Jurnal Ilmiah Citra Bakti*.
- (Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik; Proses Analisis Dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Mindarti, L. I., & Muzaqi, A. H. (2018). *Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Empowerment Through Quadruplehelix Approach (A Study at Department of Micro Enterprise Cooperatives and Trade in Batu City): Vol. 7(2)*. Journal Ilmu Sosial, Politik, Dan Ilmu Pemerintahan.
- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2020). *Analysis Of National And Local Governance Systems To Achieve The Sustainable Development Goals: Case Studies Of Japan And Indonesia.: Vol. 15(1)*. Sustainability Science.
- Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif: Vol. 3(3)*. Journal Publicuho.
- Ribeiro, A., Liliweri, A., Gana, F., & Djani, W. (2021). Public Administration Consolidation And Innovation In The Ministry Of Education And Culture Of The Republic Of Democracy Timor Leste (Case Studies In Central Inffordepe, Baucau And Viqueque Regions). *Psychology And Education Journal*, 58(5), 860–875.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Torring, J. (2019). Collaborative Innovation In The Public Sector: The Argument. *Public Management Review*, 21(1), 1–11.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).